

## Perlindungan Sosial di Masa Krisis Pandemi Covid-19: Studi Kasus Aktor Pariwisata di Kaliurang, Yogyakarta

Runavia Mulyasari <sup>1\*</sup>  Gaffari Rahmadian <sup>2</sup> 

<sup>1</sup> Program Studi Pariwisata, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Peneliti Independen, Yogyakarta, Indonesia

\* Korespondensi: [gaffarir@gmail.com](mailto:gaffarir@gmail.com) ; Tel: +62-812-9226-3338

Diterima: 12 Oktober 2023; Disetujui: 20 Mei 2024; Diterbitkan: 25 Mei 2024

**Abstrak:** Kaliurang adalah salah satu tempat wisata tertua di Yogyakarta, Indonesia. Selama beberapa dekade, Kaliurang telah bertransformasi menjadi salah satu kawasan wisata tersibuk di Yogyakarta yang menjadi tumpuan hidup masyarakatnya. Wabah COVID-19 merupakan krisis paling menantang yang menghantam industri pariwisata di Kaliurang sejak erupsi Merapi pada tahun 2010. Artikel ini berusaha untuk memahami bagaimana COVID-19 telah menghantam masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan pariwisata di Kaliurang dan bagaimana mereka menghadapi krisis tersebut. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, penulis mencoba memahami kondisi pelaku pariwisata di Kaliurang selama COVID-19 dan mengeksplorasi strategi dan bentuk perlindungan sosial yang membantu para pelaku pariwisata untuk bertahan. Kesimpulan penelitian ini adalah kegiatan pariwisata di Kaliurang pada tahun 2020-2022 terhenti bukan hanya karena COVID-19 tetapi juga karena situasi yang disebabkan oleh erupsi Merapi. Perlindungan sosial yang ditunjukkan dalam kasus pariwisata di Kaliurang tidak berasal dari pemerintah sebagai pusat kekuasaan dan sumber daya, tetapi dari solidaritas sosial yang muncul sebagai respons terhadap kurangnya peran pemerintah. Krisis pandemi telah kembali mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai moral Jawa untuk saling berbagi dan peduli melalui harmoni dan rukun. Namun, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan sosial dalam kajian pariwisata dan perlu adanya perlindungan sosial bagi pelaku pariwisata dalam bentuk asuransi.

**Kata kunci:** Perlindungan Sosial, Pariwisata, Covid-19, Kaliurang

**Abstract:** Kaliurang is one of the oldest tourist attractions in Yogyakarta, Indonesia. Over the decades, Kaliurang has transformed into one of the busiest tourist areas in Yogyakarta that has become the livelihood of its people. The COVID-19 outbreak is the most challenging crisis to hit the tourism industry in Kaliurang since the Merapi eruption in 2010. This article seeks to understand how COVID-19 has hit the local communities involved in tourism activities in Kaliurang and how they deal with the crisis. Using an ethnographic approach, the authors try to understand the conditions of tourism actors in Kaliurang during COVID-19 and explore the strategies and forms of social protection that help tourism actors to survive. The conclusion of this study is that tourism activities in Kaliurang in 2020-2022 were halted not only because of COVID-19 but also because of the situation caused by the Merapi eruption. The social protection shown in the case of tourism in Kaliurang does not come from the government as the centre of power and resources, but from the social solidarity that emerges as a response to the lack of government's role. The pandemic crisis has again reminded us of the importance of Javanese moral values to share and care for each other through harmony and harmony. However, it is necessary to conduct further studies on social protection in tourism studies and the need for social protection for tourism actors in the form of insurance.

**Keywords:** Social Security, Tourism, Covid-19, Kaliurang

## 1. Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir, ketidakstabilan alam telah menyebabkan kondisi luar biasa yang muncul sebagai bentuk krisis yang dirasakan manusia di seluruh dunia. Ingold (2000), menjelaskan bahwa alam dan manusia memiliki keterkaitan yang sangat kuat, dimana setiap tindakan manusia akan berdampak pada lingkungan, begitu pula dengan pergeseran kondisi lingkungan yang akan berdampak pada kestabilan dunia manusia. Bentuk krisis alam yang terjadi misalnya, banjir, letusan gunung berapi, dan wabah virus (seperti SARS pada tahun 2003, flu burung pada tahun 2009, Ebola pada tahun 2014, dan Mers pada tahun 2015) sebagian besar berdampak pada masyarakat. Studi yang ada menunjukkan bahwa kejadian luar biasa seperti bencana alam, letusan gunung berapi, atau wabah virus, telah menghantam beberapa industri seperti manufaktur, transportasi, jasa, makanan dan minuman, serta pariwisata (Hall, 2011; Scott & Gossling, 2015).

Di tahun 2020-2022, dunia menghadapi salah satu kejadian luar biasa yang melanda kehidupan manusia, yaitu wabah COVID-19. Kondisi luar biasa ini memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor sosial, budaya, dan ekonomi dunia. Di banyak tempat, interaksi sosial menjadi terbatas dan memunculkan cara-cara interaksi baru seperti pertemuan virtual, tidak adanya interaksi fisik secara langsung, dan berkurangnya kegiatan sosial di masyarakat, termasuk penerapan berbagai pembatasan perjalanan dalam dan luar negeri sebagai upaya memperlambat penyebaran virus (Hall & Seyfi, 2020). Penerapan kebijakan dan peraturan pembatasan sosial di berbagai negara membuat banyak negara mengalami perlambatan di berbagai sektor ekonomi akibat terbatasnya mobilitas dan aktivitas ekonomi warganya. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah pariwisata (lihat Gössling et al., 2020; Qiu et al., 2021; Yeh, 2021). Pariwisata Indonesia merupakan salah satu industri yang terdampak akibat pandemi.

Sebelum pandemi, industri pariwisata Indonesia dikategorikan sebagai salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor ini menyumbang 16,426 juta dolar pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 19,941 juta dolar pada tahun 2019 (*Statistik Kepariwisata DIY 2020*). Keseriusan pemerintah Indonesia dalam pariwisata dapat dilihat dari rencana induk untuk menciptakan 10 Bali baru di seluruh Indonesia pada tahun 2019 (Priatmoko et al., 2021). Belum lagi arah pembangunan seluruh pulau di Indonesia kebanyakan diintegrasikan dengan pariwisata. Rencana peningkatan ekonomi melalui pariwisata ini secara tidak langsung membentuk ketergantungan penuh terhadap pariwisata. Disisi lain, hal ini juga menghilangkan diversifikasi mata pencaharian yang sebelumnya ada pada masyarakat.

Padahal, sektor pariwisata merupakan sektor yang rentan terhadap krisis. Hal ini terlihat jelas pada situasi krisis akibat COVID-19 di tahun 2020-2023. Krisis akibat COVID-19 membuat pariwisata mati suri akibat penerapan *lockdown*. Kebijakan *lockdown* paling dirasakan oleh masyarakat dan komunitas yang bergantung hidup sepenuhnya pada pariwisata sebagai sumber mata pencaharian utama. Salah satu kelompok masyarakat yang sangat terdampak oleh krisis COVID-19 adalah masyarakat Yogyakarta. Selama dua dekade terakhir, kebanyakan masyarakat Yogyakarta sangat bergantung pada sektor pariwisata. Namun, pada periode krisis COVID-19 banyak hotel, atraksi wisata, destinasi wisata dan kegiatan pariwisata berhenti beroperasi. Akibatnya banyak dari pelaku yang terlibat dalam pariwisata kehilangan pekerjaan, kesulitan untuk makan, dan terpaksa menjual berbagai aset yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan sosial bagi para pekerja pariwisata.

Ada beberapa literatur yang membahas tentang krisis dan perlindungan sosial di Indonesia (Kutanegara, 2017; Kutanegara & Noteboom, 2000; Habibullah, 2007; Susantyo et al., 2). Namun, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada konteks industri pariwisata dan para pelakunya. Studi-studi mengenai krisis dan pariwisata kebanyakan berfokus pada dampak krisis dalam dimensi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan, serta komodifikasi krisis ke dalam aktivitas pariwisata sebagai sumber mata pencaharian (lihat (Purwomarwanto & Ramachandran, 2015; Rindasih et al., 2019; Susanto & Sushartami, 2020). Atau apa yang disebut oleh para ahli pariwisata lainnya sebagai pariwisata gelap, yaitu komodifikasi situs kematian dan bencana (Ghimire, 2015; Wright, 2014). Dalam perspektif ini, kegiatan pariwisata membantu kebangkitan masyarakat lokal setelah krisis alam yang disebabkan oleh

gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, badai, atau bentuk krisis manusia lainnya. Kehadiran wisatawan secara langsung membantu masyarakat lokal untuk bertahan hidup dan melanjutkan kehidupannya. Proses bertahan hidup masyarakat lokal yang berpartisipasi dalam pariwisata, dalam hal kemampuan mengatasi situasi, dan bagaimana perlindungan sosial di antara para pelaku pariwisata masih jarang dibahas, sementara studi tentang sektor pariwisata telah menunjukkan pentingnya perlindungan atau perlindungan sosial di industri pariwisata (Lotfi et al., 2014).

Studi ini berusaha untuk memahami krisis pariwisata yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dengan mengambil lokasi di wilayah Yogyakarta, lebih khusus lagi di kawasan wisata Kaliurang yang terletak di lereng Gunung Merapi, di mana para pelaku pariwisata harus menghadapi dua jenis krisis yang berbeda, yaitu erupsi Merapi dan COVID-19 pada periode 2020-2022. Kondisi yang kompleks ini menciptakan situasi yang tidak dialami oleh pelaku pariwisata di wilayah lain. Untuk memahami bagaimana para pelaku pariwisata bertahan dalam kondisi seperti ini, penulis mulai dengan mempertanyakan bagaimana para pelaku di daerah-daerah tersebut mengalami kondisi krisis selama wabah COVID-19? Bagaimana mereka menghadapi situasi krisis ini? Lalu perlindungan sosial seperti apa yang dapat membantu para pelaku pariwisata ini untuk bertahan dalam kondisi krisis?

Memahami bagaimana para pelaku pariwisata menghadapi krisis yang disebabkan oleh Merapi dan Covid 19 perlu untuk memahami gagasan perlindungan sosial. Secara umum, perlindungan sosial mempelajari hubungan antara minoritas dan kelompok-kelompok dalam masyarakat atau negara dan terpisah dari bentuk-bentuk perlindungan lainnya. Perlindungan sosial adalah suatu kondisi di mana orang merasa aman dan sehat di masyarakat dan melanjutkan cara hidup rutin mereka (Lotfi et al., 2014, p. 140). Akan tetapi, pendekatan perlindungan sosial membutuhkan pemahaman mengenai strategi sosial (bukan semata-mata individu) yang digunakan individu, rumah tangga, dan kelompok untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk penghidupan (Kutanegara, 2017). Noteboom (2003, p. 49) menjelaskan bahwa tujuan perlindungan sosial adalah 'penyediaan perawatan dan dukungan yang sering kali bersifat lokal, serta strategi dan tindakan individu atau kolektif untuk mengamankan akses terhadap perawatan dan dukungan demi kesejahteraan umum individu, rumah tangga, dan kelompok tertentu'. Dalam hal ini, perlindungan sosial merupakan bagian dari proses jangka panjang yang saling menguntungkan, bersifat resiprositas, dan amal yang muncul di antara individu atau di antara individu di dalam/di luar kelompok. Dapat dikatakan bahwa 'perlindungan sosial merupakan strategi jangka panjang untuk mencapai perlindungan dan hak atas bantuan yang tidak hanya terbatas pada anggota rumah tangga, tetapi juga harus mencakup lingkup yang lebih luas seperti keluarga, tetangga, dan jaringan sosial' (Kaag et al., 2005).

Ketiadaan perlindungan sosial telah memaksa para pelaku (individu dan kelompok) yang rentan dalam masyarakat untuk bergantung pada praktik resiprositas. Gagasan resiprositas mengacu pada pertukaran barang dan jasa yang dapat bersifat simetris maupun asimetris antara individu dan/atau kelompok (Komter, 2014). Resiprositas simetris melibatkan pertukaran antara individu dalam hubungan sosial yang setara. Dalam kasus-kasus seperti ini, para aktor yang berada dalam posisi atau strata yang sama akan menganggap diri mereka sama. Sementara itu, pertukaran hubungan asimetris dapat berupa redistribusi sumber daya atau akses. Hal ini dapat ditemukan, misalnya, ketika seorang bos jip yang kaya raya mengundang para tamu ke pernikahan putrinya atau ketika seorang kepala desa memanggil warga desa untuk berkontribusi dalam biaya dan membantu persiapan festival desa. Di sini otoritas dan ketidaksetaraan terlibat, dan hubungan tersebut melibatkan kekuasaan yang tidak seimbang seperti pada hubungan patron klien.

Resiprositas sendiri membutuhkan hubungan diadik yang melibatkan dua individu dan/atau pihak, sampai batas tertentu diperlukan untuk menciptakan ikatan personal. Resiprositas cenderung menjadi ciri khas komunitas kecil di mana para anggotanya saling mengenal dan kegiatan kolektif masih umum dilakukan. Dalam pengertian yang lebih luas tentang perlindungan sosial, resiprositas diterjemahkan sebagai sistem dukungan timbal balik yang saling menguntungkan. Hal ini sering muncul dalam hubungan sosial dan jaringan sosial yang terdiri dari keluarga inti, dan lingkaran yang lebih luas seperti kerabat, tetangga, teman, dan komunitas. Hal ini menjelaskan bahwa dalam relasi dan tindakan di antara mereka 'terdapat dimensi moral dan juga instrumen untuk menyediakan

lingkungan sosial yang dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial ketika orang dihadapkan pada masalah yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri' (Kutanegara, 2017).

Salah satu bentuk tindakan timbal balik yang muncul pada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa adalah gotong royong (Slikkerveer, 2019). Dalam tindakan timbal balik dan saling membantu, seperti gotong royong, melibatkan harapan akan adanya balasan yang terkadang terjadi secara spontan, namun tidak demikian halnya dengan solidaritas masyarakat. Gagasan gotong royong ini sendiri diterjemahkan dari nilai moral utama orang Jawa untuk menjaga keharmonisan melalui rukun (lihat (Jay, 1969). Rukun adalah salah satu nilai moral terdalam yang dirasakan oleh orang Jawa, yang tercermin dalam praktik hubungan sosial mereka yang dengan sukarela membantu orang lain. Dalam hal ini, timbal balik, saling membantu, atau solidaritas masyarakat mengadopsi keberadaan dimensi moral rukun. Dari studi yang ada tentang masyarakat Jawa, sulit untuk menilai apa yang sebenarnya terjadi di tingkat desa di Jawa, apakah lembaga-lembaga yang melibatkan resiprositas dan gotong royong masih memiliki fungsi perlindungan sosial, dan, jika ya, sejauh mana fungsi perlindungan sosial tersebut. Lembaga-lembaga lokal ini dapat menyediakan bentuk-bentuk perlindungan sosial yang penting, dan merupakan satu-satunya sumber bantuan pada saat-saat yang paling dibutuhkan, seperti pada saat krisis.

Selain itu, dalam situasi krisis dan bencana, keterbatasan perlindungan sosial desa dapat terlihat karena solidaritas sosial semakin berkurang. Dengan menggunakan pengertian perlindungan sosial di atas, penelitian ini memasukkan cara-cara pelaku pariwisata mengalami, memandang, dan merespons guncangan dan tekanan baik yang bersifat material maupun non-material yang memengaruhi kehidupan individu dan rumah tangga pelaku pariwisata di masa krisis pandemi. Dengan memahami hal tersebut, studi ini memberikan jendela baru untuk memahami dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari COVID-19 di sektor pariwisata, yang dapat menjadi dasar untuk meninjau ulang regulasi pariwisata dan menyusun regulasi terkait yang berfokus pada perlindungan sosial bagi pelaku pariwisata di masa depan.

## 2. Metode

Penelitian etnografi ini dilakukan pada bulan April hingga Oktober 2021 dan dilanjutkan pada bulan Agustus hingga Oktober 2022. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Observasi partisipasi digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai respon nyata pelaku pariwisata selama pandemi, kondisi pariwisata selama pandemi di Kaliurang, dan melihat hubungan antar pelaku pariwisata. Untuk mendukung gambaran dari observasi partisipasi mengenai kondisi yang dialami oleh pelaku pariwisata di Kaliurang, penulis juga melakukan wawancara mendalam untuk memahami perasaan, pemikiran, pandangan individu, dan strategi informan untuk bertahan di masa pandemi.

Selain pengumpulan data primer, penulis juga menggunakan data sekunder dari literatur dan sumber-sumber internet. Data sekunder ini membantu penulis untuk memahami kondisi dan wacana pariwisata global dan lokal mengenai aktivitas pariwisata, khususnya di Indonesia dan Yogyakarta. Selain itu, informasi dari data sekunder ini juga digunakan untuk mengetahui narasi yang dibangun oleh para pelaku pariwisata untuk tetap bertahan. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada penelitian ini, situasi pandemi membatasi penulis untuk melakukan mobilitas dan memiliki akses secara langsung pada informan penelitian untuk melakukan wawancara langsung dan observasi partisipasi secara leluasa.

Penelitian ini dilakukan di sekitar kawasan wisata Kaliurang dengan melibatkan berbagai aktor yang secara langsung terlibat dan mengandalkan pariwisata sebagai sumber mata pencaharian utama. Para pelaku diklasifikasikan sebagai pengemudi dan anggota komunitas lava tour (5 orang), pengelola komunitas jip wisata (2 orang), pemilik atau juragan jip (4 orang), penjual makanan dan minuman (2 orang), pemilik dan karyawan hotel dan penginapan (2 orang), pemilik warung makan (3 orang), dan penjual souvenir (2 orang). Informan terdiri dari laki-laki dan perempuan sebanyak 20 orang dengan 12 laki-laki dan 8 perempuan.

Setiap informan diwawancarai untuk mendapatkan data mengenai kondisi, perasaan, pengalaman, dan pemikiran mereka terhadap apa yang mereka hadapi selama pandemi COVID-19 selama satu setengah tahun terakhir ini. Untuk mendapatkan akses ke informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan kontak pribadi penulis untuk memulai penelitian dan dilanjutkan dengan meminta rekomendasi dari informan, atau teknik *snowball*. Informan dalam penelitian ini telah dijustifikasi dengan beberapa alasan seperti bekerja di industri pariwisata, mengalami krisis akibat erupsi Merapi, dan aktif sebagai pelaku pariwisata di Kaliurang. Kondisi pandemi COVID-19 juga berdampak pada jumlah informan dan keragaman latar belakang informan yang terlibat dalam penelitian ini. Selain 20 informan kunci, aktor-aktor lain yang merupakan anggota masyarakat lokal di Kaliurang juga dilibatkan dalam percakapan sehari-hari untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai gagasan perlindungan sosial di kalangan masyarakat lokal yang terkait dengan penelitian ini.

### 3. Hasil

Sejak beberapa dekade terakhir, Yogyakarta menjadi salah satu tujuan wisata utama di Pulau Jawa. Dari Utara hingga Selatan Yogyakarta memiliki berbagai jenis tujuan wisata, misalnya wilayah Utara menawarkan keunikan budaya dan pemandangan Merapi sebagai objek wisata utama, sementara wilayah Selatan memiliki pantai sebagai tujuan utama. Kegiatan pariwisata memberikan kontribusi pada sektor ekonomi bagi daerah dan khususnya bagi masyarakat setempat. Pada tahun 2019, misalnya, total pendapatan Yogyakarta dari sektor pariwisata mencapai lebih dari 666 miliar rupiah, yang berasal dari pajak hotel dan restoran, biaya hiburan, retribusi objek dan daya tarik wisata, retribusi izin usaha pariwisata, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Sayangnya, situasi ini dengan cepat berubah seiring dengan penyebaran virus COVID-19 di tahun 2020. Penyebaran virus COVID-19 di Yogyakarta dengan cepat melumpuhkan berbagai sektor penting terutama pariwisata. Akibatnya, jumlah wisatawan yang datang ke Yogyakarta terus mengalami penurunan. Baik wisatawan domestik maupun internasional yang biasanya dapat dilihat di berbagai kawasan wisata sudah tidak dapat ditemui lagi. Jalanan dari atau menuju kawasan wisata terlihat lengang dan bus-bus pariwisata tidak lagi memenuhi jalanan. Hotel-hotel terlihat begitu sepi dan tenang, karena banyaknya wisatawan yang membatalkan perjalanan mereka.

Dampak krisis COVID-19 terhadap sektor pariwisata terbukti dengan penurunan pendapatan daerah menjadi 285 miliar rupiah di tahun 2020 (lihat Tabel 1.). Yogyakarta tidak hanya kehilangan lebih dari setengah pendapatan yang mereka terima pada tahun 2019 tetapi juga mengurangi pendapatan daerah yang menyusut sebesar 6,7% pada kuartal kedua (lihat (Nugroho & Negara, 2020, p. 7). Kondisi krisis COVID-19 ini juga meningkatkan jumlah pengangguran di sektor perhotelan, dan pendapatan yang lebih kecil atau nol bagi pelaku pariwisata lainnya. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya perlindungan sosial (termasuk subsidi, pensiun, atau tunjangan sosial) bagi para pelaku pariwisata.

**Tabel 1.** Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata Provinsi DIY Tahun 2020

No	Sumber	Kota	Sleman	Bantul	Kulonprogo	Gunung Kidul	Pemda DIY	Jumlah
1	Pajak Hotel & Restaurant	121.800.824.570	106.963.287.223	3.993.259.222	2.435.738.612	5.246.469	-	240.439.870.096
2	Pajak Tontonan/Hiburan	3.870.424,584.00	8.375.071.998	263.763.420	3.827.500	99.578.500	-	12.612.666.002
3	Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata	-	2.201.720.000	16.889.349.750	3.314.492.000	9.187.882.860	-	31.593.444.510
4	Retribusi Perijinan Usaha Pariwisata	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	-
5	Retribusi Penggunaan Aset Milik Pemda (Sewa/Kontrak/ Bagi Hasil)	520.458.833	54.720.550	10.650.000	422.780.050	58.373.650	35.250.000	1.102.233.083
	<b>Total</b>	<b>126.191.707.987</b>	<b>117.594.799,771</b>	<b>21.157.022.392</b>	<b>6.176.838.162</b>	<b>14.592.595.479</b>	<b>35.250.000</b>	<b>285.748.213.791</b>

Sumber: Statistik Kepariwisata DIY, 2020

Sebagai respon atas krisis COVID-19, pada masa-masa awal penyebaran COVID-19 banyak kampung di Yogyakarta yang secara mandiri menutup wilayahnya dari orang luar. Setiap jalan masuk ke kampung-kampung ditutup dengan bambu runcing dan dijaga oleh beberapa pemuda dan bapak-bapak yang menjadi penjaga kampung untuk mengontrol akses masuk ke dalam kampung. Pembatasan akses ini dinyatakan dengan jelas melalui spanduk besar bertuliskan "kampung ini dikunci" dan "tidak ada yang boleh masuk ke dalam kampung kecuali warga setempat" di depan bambu yang melintang. Inisiatif akar rumput dari tingkat kampung untuk turut serta mengontrol dan melindungi lingkungannya dari infeksi COVID-19 ini dilakukan secara serentak oleh banyak kampung di Yogyakarta, termasuk Kaliurang. Seperti yang dikemukakan (Semedi, 2021), wabah virus COVID-19 merupakan bentuk pengalaman yang jauh, sementara banyak orang tidak tahu tentang virus dan cara menghentikan wabah virus tersebut.

Inisiatif lokal *lockdown* ini, berdampak kuat pada kegiatan pariwisata yang menjadi salah satu sumber daya penting bagi masyarakat lokal di Yogyakarta, termasuk Kaliurang. Prinsip lokal *lockdown* secara ketat mengontrol mobilitas manusia dan akses manusia untuk masuk dan keluar ke area tertentu, akibatnya, banyak dari pelaku pariwisata vakum dari bisnis mereka. Lebih jauh, pemerintah Indonesia mengeluarkan pembatasan mobilitas pada pertengahan tahun 2020 hingga 2021 secara nasional, dengan beberapa nama seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) untuk mengantisipasi penyebaran virus. PSBB dan PPKM turut memaksa 90% industri terkait pariwisata, seperti sektor perhotelan, sektor makanan dan minuman, sektor atraksi dan hiburan, sektor transportasi, dan sektor jasa (kebugaran dan spa, agen perjalanan, atau layanan MICE) untuk menghentikan bisnis mereka yang membuat banyak pelaku pariwisata kehilangan pekerjaan mereka sebagai dampak dari kondisi ini (Farida, 2022; Mulyasari, 2023; Utami & Kafabih, 2021; Wibowo & Sugeng, 2022).

McKibbin & Fernando (2020) menjelaskan bahwa wabah COVID-19 merupakan bencana bagi perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata, sebagai penyumbang terbesar, menjadi salah satu sektor yang mengalami penurunan terparah. Pariwisata yang sering dikategorikan sebagai sektor informal yang tidak didesain untuk menghadapi kondisi luar biasa seperti krisis pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari tidak adanya perlindungan mata pencaharian oleh negara atau industri untuk melindungi para pelaku pariwisata. Isu perlindungan sosial ini menjadi nyata ketika semua yang terlibat dalam kegiatan pariwisata terpaksa berhenti akibat wabah COVID-19 dan penerapan beberapa peraturan yang digunakan untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19.

### **3.1. Kondisi pariwisata sebelum Pandemi Covid-19 di Kaliurang**

Pergeseran fenomena pariwisata sebagai tren baru yang populer di kalangan kelas menengah ke bawah dan aktivitas yang mudah diakses telah memicu banyak wisatawan untuk melakukan kunjungan dan perjalanan ke Kaliurang. Antusiasme dari sekelompok orang untuk mengunjungi Kaliurang dijawab oleh para investor dan masyarakat setempat melalui perubahan infrastruktur pendukung destinasi wisata. Sebagai contoh, banyak penginapan kecil yang dibangun untuk mengakomodasi kelompok wisatawan dengan anggaran terbatas, banyak vila dan hotel baru yang dibangun, rumah-rumah penduduk yang diubah menjadi warung atau kedai makan, area baru yang diubah menjadi atraksi wisata atau area parkir, atau penyelenggaraan acara baru di Kaliurang. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa antusiasme pariwisata di Kaliurang berperan penting dalam proses pembangunan di Kaliurang.

Pariwisata perlahan-lahan menjelma menjadi sumber mata pencaharian yang menjanjikan bagi masyarakat lokal untuk berani menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Pada hari biasa, pendapatan para pelaku pariwisata di Kaliurang sebelum pandemi berkisar antara 500.000-1.000.000 rupiah, dan akan meningkat setidaknya 3 kali lipat pada akhir pekan atau masa liburan panjang. Tentunya, banyak yang melihat pariwisata sebagai cahaya baru bagi kehidupan masyarakat di Kaliurang. Sebagian dari masyarakat memilih untuk terlibat sebagai fasilitator wisata atau untuk peran lain dalam pariwisata (misalnya, staf vila/hotel, supir atraksi jip, pelaku tour operator, pemandu wisata), beberapa yang lain memilih untuk membuka warung atau mengubah rumah mereka menjadi

penginapan murah. Kaliurang perlahan-lahan mulai menjadi ranah persaingan bagi berbagai pelaku pariwisata.

Persaingan di antara para pelaku pariwisata sangat kompetitif, mereka harus agresif untuk bertahan di industri ini. Di antara para pelaku yang memiliki layanan yang berbeda terkadang memunculkan konflik, dan memaksa mereka untuk bernegosiasi dengan situasi yang ada. Misalnya, para pelaku akomodasi menawarkan harga yang lebih rendah untuk para tamu, dengan keramahan yang baik, keamanan dan fasilitas yang bersih. Sementara itu, penyedia makanan dan minuman menawarkan makanan khas Kaliurang, dan membuat tamu memilih warung mereka dengan memberikan pelayanan terbaik. Ketegangan sempat muncul di antara para pelaku wisata di Tlogo Putri, antara sopir jip dan penjual makanan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu anggota komunitas jip di Tlogo Putri:

Sejak tahun 2010, lava tour menjadi sangat populer dan menjadi daya tarik tersendiri di Kaliurang. Banyak wisatawan yang tiba di Tlogo Putri akan langsung melakukan lava tour. Terkadang, banyak juga pengemudi jip yang sangat agresif dengan langsung menawarkan jasanya kepada wisatawan setelah mereka parkir. Hal ini membuat banyak penjual makanan marah, karena mereka tidak dapat menjual makanan mereka dan merasa tidak adil. Karena dari sudut pandang mereka setelah melakukan lava tour banyak wisatawan yang langsung meninggalkan tempat tersebut. Hal itu tidak memberikan kesempatan kepada penjual makanan untuk menawarkan produk makanan mereka. Sebelum penjual makanan protes dan memunculkan konflik, kedua aktor lebih memilih untuk melakukan negosiasi dan sepakat untuk memberikan ruang bagi penjual makanan untuk menjual produknya sebelum pengemudi jip menawarkan jasanya kepada wisatawan'. (F, 34 tahun, pengemudi dan pemilik jip)

Konflik ini bisa muncul karena di antara para pelaku pariwisata memiliki aturan tidak tertulis '*yo bagi-bagi, ojo dipangan dewe*' atau 'ya harus berbagi, tidak boleh dimonopoli'. Aturan tak tertulis ini terkait dengan prinsip orang Jawa untuk selalu berbagi dan tidak boleh serakah. Penting untuk menciptakan kerukunan atau 'rukun' di antara individu-individu, karena hal ini merupakan nilai dan semangat penting bagi orang Jawa yang masih dijunjung tinggi dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, kerukunan atau rukun tidak hanya terbatas pada kehidupan sosial para pelaku, tetapi juga meluas ke industri pariwisata untuk menciptakan egalitarianisme ekonomi.

Tingginya persaingan di antara para pelaku di Kaliurang membuat para pelaku perlu melindungi akses dan sumber daya yang telah mereka miliki. Namun, hal tersebut perlu dilakukan dengan cara yang halus, melalui kerjasama, saling menghargai, dan dalam suasana yang tenang. Salah satu strategi untuk bertahan dalam persaingan dan mengadopsi semangat kerukunan adalah dengan membuat suatu kelompok dalam bentuk paguyuban atau komunitas yang bertujuan untuk memastikan anggota komunitas tersebut bertahan dalam persaingan, mengurangi monopoli dari salah satu aktor atau aktor tertentu, dan melindungi para anggotanya. Dalam hal ini, kehadiran paguyuban sebagai organisasi informal membawa gagasan komunalitas dan harmoni di antara para anggotanya yang mengusulkan hubungan ekonomi dan sosial. Proses ini telah membawa gagasan komunalitas di antara para pelaku pariwisata, karena mereka perlu menciptakan suasana kompetisi yang aman bagi kelompok untuk melindungi mereka, memonopoli beberapa sumber daya, dan melindungi sumber-sumber kehidupan bagi para anggota. Paguyuban di antara para pelaku pariwisata di Kaliurang dapat diartikan sebagai sebuah bentuk 'rumah' yang melindungi mereka dalam menjalankan aktivitas pariwisata. Kehadiran paguyuban membantu para pelaku pariwisata untuk saling berbagi kesempatan, sumber daya, dan selalu solid dalam menghadapi kondisi apapun, termasuk ketika terjadi krisis baik krisis alam maupun krisis sosial. Karena bentuk organisasi informal ini dianggap efektif, saat ini terdapat lebih dari 55 paguyuban yang berdiri untuk mendukung industri pariwisata di Kaliurang.

Bersamaan dengan transformasi ekologi ini, struktur sosial baru di Kaliurang terbentuk oleh kehadiran pariwisata. Bencana alam yang disebabkan oleh erupsi Gunung Merapi telah membentuk sebuah tempat di mana bencana bertransformasi menjadi ruang peluang baru dalam bentuk kegiatan pariwisata yang menguntungkan bagi masyarakat lokal yang mencari peluang tersebut (Susanto &

Sushartami, 2020). Di sisi lain, terbentuk pula solidaritas di antara para aktor dalam bentuk organisasi sosial informal komunitas atau paguyuban untuk menjamin akses terhadap sumber daya. Lebih lanjut, komunitas atau paguyuban membantu para pelaku untuk selalu berinovasi dalam menawarkan atraksi baru, terus mengikuti tren pariwisata, dan membuat bentuk-bentuk pariwisata yang inovatif sebagai respons terhadap permintaan pasar. Dalam hal ini, perkembangan Kaliurang sebagai destinasi yang populer dengan berbagai macam atraksi wisata dan pelaku pariwisata telah memberikan ruang kesempatan bagi masyarakat lokal dan masyarakat dari luar. Namun, hal tersebut juga membentuk persaingan antar pelaku (dalam bentuk individu maupun komunitas) untuk bertahan dalam industri pariwisata.

### 3.2. *Hidup dalam Krisis: Kekuatan Solidaritas Sosial*

Setelah situasi krisis di tahun 2010, masyarakat setempat berhasil mengatasi dan mengubah tragedi tersebut menjadi sebuah peluang baru melalui kegiatan pariwisata. Berbeda dengan kondisi di tahun 2010, krisis di tahun 2020 yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 membuat industri pariwisata di Kaliurang mati suri (Mulyasari, 2023; Mulyasari & Rahmadian, 2023). Hampir dua tahun sejak Covid-19 diumumkan sebagai pandemi global, krisis di sektor pariwisata masih belum sepenuhnya pulih. Para pelaku pariwisata di Kaliurang merasa sangat terpuak selama pandemi Covid-19, sebagian besar dari mereka menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Lebih lanjut, situasi di Kaliurang menjadi lebih buruk dan sulit untuk pulih karena status aktif Gunung Merapi sepanjang tahun membuat wisatawan meragukan keselamatan mereka dan membatalkan perjalanan mereka ke Kaliurang.

Situasi yang tidak menentu selama pandemi COVID-19 membuat para pelaku pariwisata di Kaliurang melakukan banyak strategi untuk kelangsungan pariwisata dan kehidupan mereka sendiri. Banyak pelaku pariwisata, terutama yang bekerja di atraksi wisata mempertimbangkan peran wacana digital di media sosial untuk keberlangsungan pariwisata. Pada masa pandemi di tahun 2020 dan 2021, wacana digital di media sosial tentang Yogyakarta didominasi oleh informasi tingginya angka infeksi covid-19, penutupan objek wisata, dan status erupsi Gunung Merapi. Wacana digital ini membuat sektor pariwisata sulit untuk pulih, khususnya Kaliurang. Terlebih lagi, arah pembicaraan di media sosial tidak dapat dikontrol oleh para pelaku pariwisata di Kaliurang.

Mengimbangi pemberitaan di media sosial, para pelaku pariwisata membagikan dan menginisiasi *live report* dan narasi tandingan tentang kondisi keamanan Kaliurang melalui media sosial. Para pelaku pariwisata membagikan upaya mereka dalam mempersiapkan infrastruktur kebersihan dan kesehatan sesuai dengan protokol covid-19 di setiap destinasi, warung, kafe, penginapan, vila, dan objek wisata. Mereka juga membagikan foto atau video situasi di Kaliurang, termasuk foto Gunung Merapi. Tidak jarang, mereka juga memberikan pendapat pribadi tentang situasi di Kaliurang yang sudah kondusif bagi wisatawan sebagai keterangan foto atau video. Informasi ini dibagikan di Facebook, Instagram, dan status WhatsApp yang secara langsung menasar pelanggan setia mereka. Narasi tandingan ini cukup efektif dan membuat beberapa pelanggan setia mereka berani untuk mengunjungi Kaliurang lagi.

Selain tindakan digital, para pelaku pariwisata (individu dan komunitas) di Kaliurang sepakat untuk membuka Kaliurang untuk wisatawan setelah lockdown lokal pada tahun 2020. Pilihan untuk membuka Kaliurang bagi wisatawan selama pandemi merupakan tindakan yang cukup berani, karena bertentangan dengan peraturan nasional tentang pembatasan mobilitas manusia. Namun, keputusan ini bertujuan untuk membantu para pelaku pariwisata untuk bertahan dan pulih dari krisis. Keputusan ini berdampak baik dengan jumlah wisatawan yang sedikit meningkat saat akhir pekan, terutama di tahun 2021. Penjual makanan dapat menjual seluruh produknya, atau setara dengan setengah dari total produk yang mereka jual sebelum pandemi. Situasi serupa juga dirasakan oleh pelaku pariwisata lain yang menawarkan jasa dan atraksi, seperti lava tour yang bisa mendapatkan 4-6 trip/hari pada akhir pekan. Hanya penginapan dan vila yang tidak dapat merasakan dampak dari strategi yang digunakan oleh pelaku lain. Namun, baik tindakan digital maupun tindakan nyata yang dirancang oleh para

pelaku pariwisata di Kaliurang tidak dapat membuat mereka keluar dari krisis, hal ini tidak memiliki dampak yang kuat pada jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kaliurang.

Situasi ini semakin memburuk karena tidak ada perlindungan dari pemerintah atau bahkan dunia kapan krisis pandemi ini akan berakhir. Dalam hal ini, para pelaku pariwisata di Kaliurang tidak memiliki kepastian akan masa depan pariwisata. Dibandingkan dengan krisis erupsi, situasi saat ini berbeda dalam artian semua orang terdampak oleh krisis dan berusaha untuk bertahan hidup selama krisis ini. Bekerja di sektor informal membuat para pelaku pariwisata tidak memiliki akses terhadap hak-hak pekerja formal, seperti tunjangan kesehatan atau krisis. Sayangnya, pemerintah hanya mengambil peran kecil untuk membantu para pelaku pariwisata selama krisis pandemi. Kontribusi pemerintah selama pandemi sangat terbatas. Pemerintah hanya memberikan bantuan kecil di awal pandemi yang tidak dapat menutupi kerugian para pelaku pariwisata. Seperti yang dijelaskan oleh pemilik warung makan Bapak Suparjinah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah:

Saya bertahan hidup sebagian besar karena tabungan saya sendiri. Mayoritas pelaku pariwisata di Kaliurang mendapatkan bantuan dari pemerintah dan kementerian pariwisata berupa uang tunai dan sembako sebanyak 3 kali dari bulan Juni hingga Agustus. Sampai Anda menanyakan pertanyaan ini, saya tidak mendapatkan bantuan lain dari pemerintah' (S, pemilik Warung dinda, 05 Mei 2021)

Pernyataan Suparjinah tentang kurangnya dukungan dari pemerintah untuk para pelaku pariwisata di Kaliurang juga disetujui oleh yang lain. Dukungan sosial lainnya diberikan oleh Pembayun (putri gubernur DIY) pada bulan September 2021 kepada beberapa pelaku pariwisata seperti pedagang makanan, pelaku UMKM, dan komunitas jip dalam bentuk sembako. Sayangnya, bantuan tersebut terbatas pada beberapa pelaku pariwisata di Kaliurang. Bantuan rutin dari pemerintah untuk rumah tangga adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini tidak secara khusus muncul selama pandemi, tetapi sudah diberikan sejak periode presiden sebelumnya. Namun, jumlah uang tunai untuk para pelaku pariwisata ditingkatkan dari 110.000 rupiah/bulan menjadi 200.000 rupiah/bulan selama pandemi. Jumlah uang ini dimaksudkan untuk dibelanjakan bahan makanan. Bentuk lain dari bantuan pemerintah untuk rumah tangga yang memiliki anak (SD, SMP, dan SMA) di Kaliurang adalah uang pendidikan yang diberikan setiap tiga bulan. Jumlahnya tergantung pada tingkat pendidikan anak yang digunakan untuk membeli pulsa telepon seluler untuk mendukung sekolah online untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan.

Hal ini, dukungan dari pemerintah selama krisis COVID-19 sangat terbatas sehingga tidak dapat menutupi seluruh biaya hidup kelompok rentan termasuk pelaku pariwisata. Kondisi ini juga menyadarkan mereka betapa rapuhnya pekerjaan mereka. Minimnya dukungan sosial dari pemerintah juga menjadi salah satu pemicu yang mendorong para pelaku pariwisata mengambil keputusan untuk membuka Kaliurang bagi wisatawan dan meningkatkan solidaritas di antara mereka. Di tahun pertama krisis COVID-19, para pelaku pariwisata berbagi solidaritas dengan sesama dengan cara menyediakan makanan bagi mereka yang terkena dampak pandemi. Mereka membuat keranjang bambu untuk menaruh sayuran, beras, atau bahan makanan lain yang ingin mereka bagikan atau tukarkan dengan yang dimiliki orang lain. Tindakan ini membantu mereka untuk bertahan hidup. Aksi semacam ini juga dilakukan oleh komunitas di luar Kaliurang dengan nama #merapi atau tagar merapi, yang mengumpulkan makanan dari seluruh Yogyakarta dan disumbangkan di Kaliurang untuk membantu para pelaku pariwisata di daerah ini. Bagi masyarakat di Kaliurang, khususnya para pelaku pariwisata, solidaritas sosial ini sangat berperan penting untuk membantu mereka bertahan di tengah krisis, terutama di awal pandemi COVID-19 ini.

Bentuk solidaritas lainnya diekspresikan antara dua orang yang memiliki hubungan yang lebih personal, misalnya keluarga atau antara patron atau juragan dengan kliennya (pemilik dan sopir jip) yang kebanyakan dalam bentuk pinjaman untuk membantu orang-orang terdekatnya agar dapat bertahan hidup di masa pandemi. Pinjaman ini tidak berbunga dan waktu pengembaliannya pun fleksibel. Sampai batas tertentu, individu yang lebih berkuasa dan kaya memberi dan berbagi apa yang mereka miliki tanpa menganggap tindakan itu sebagai timbal balik. Banyak pengemudi yang

mengalaminya ketika patron mereka memberikan sejumlah uang untuk merayakan Idul Fitri. Pada periode tertentu, mereka juga menghentikan biaya sewa dan perjalanan hanya karena mereka ingin berbagi apa yang mereka dapatkan dari pariwisata dan menjaga hubungan baik dengan pengemudi mereka. Tindakan individu ini muncul secara alamiah di masa krisis pandemi. Bentuk solidaritas juga muncul di dalam komunitas pariwisata seperti yang diceritakan oleh Fajar,

Komunitasnya (Tlogo Putri Lava Tour) membagi uang kas untuk para anggota. Setiap anggota mendapatkan Rp. 1.500.000 dan sembako. Jumlah uang ini hanya untuk anggota, sedangkan jika anggota ingin berbagi dengan pengemudi dan klien lain, itu terserah mereka' (F, pemilik dan pengemudi jip wisata).

Aksi serupa juga muncul di kalangan komunitas wisata lain di Kaliurang meskipun bentuk dukungannya tergantung pada keputusan komunitas. Kebanyakan dari mereka membagikan uang komunitas dalam bentuk sembako. Gerakan komunitas ini sangat membantu para anggotanya untuk menyambung hidup di masa pandemi. Pada tahun 2021, meskipun krisis masih ada tetapi pariwisata perlahan-lahan berjalan kembali, mereka mulai mengumpulkan uang komunitas sekitar Rp. 10.000/trip untuk dibagikan kepada para anggota. Meskipun bentuk solidaritas sosial ini memiliki dampak yang kuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun hal ini tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Target wisatawan dari para pelaku wisata di Kaliurang membuat proses pemulihan menjadi cukup berat. Sementara itu, sebelum pandemi, mayoritas pelaku pariwisata tidak memperhatikan wisatawan lokal, hanya wisatawan mancanegara atau setidaknya wisatawan dari luar Yogyakarta. Mereka beranggapan bahwa wisatawan dari luar Yogyakarta lebih banyak membelanjakan uangnya dibandingkan wisatawan lokal. Hal ini membuat mereka sering mendiskriminasi tamu lokal, dan tidak pernah menempatkan wisatawan lokal sebagai wisatawan yang penting. Selain itu, krisis jangka panjang tidak pernah terbayangkan oleh sebagian besar pelaku pariwisata, karena mereka lebih memilih untuk melakukan kegiatan berdasarkan bisnis. Tanpa berusaha menciptakan hubungan diadik dengan pelanggan mereka. Dalam artian, mereka tidak mau berinvestasi untuk menciptakan ikatan yang loyal dengan pelanggan. Hal inilah yang terjadi pada mayoritas pelaku pariwisata di Tlogo Putri, meskipun Kaliurang telah dibuka namun mereka masih sulit untuk pulih.

Relatif berbeda dengan apa yang terjadi di Tlogo Putri, warung makan atau warung di sekitar Tugu Udang memiliki strategi yang berbeda untuk bertahan di industri pariwisata. Karena mereka tahu bahwa persaingan antar pelaku pariwisata di Kaliurang sangat tinggi, mereka lebih memilih untuk melindungi pelanggan mereka dengan menciptakan ikatan yang kuat berdasarkan hubungan diadik. Penting bagi mereka untuk mengingat tamu mereka dan apa yang mereka sukai, karena itu perlu untuk menjaga suasana tetap baik dan memberikan keramahan terbaik untuk membuat mereka nyaman dengan situasi di warung/warung makan, yang mereka sebut sebagai *ngayomi* langganan. Ide *ngayomi* langganan dijelaskan oleh Mbah Gito:

*Ngayomi* langganan adalah istilah Jawa untuk menciptakan hubungan yang lebih dari sekedar pemilik warung dengan pembelinya, perlu dilakukan secara personal. Sebagai contoh *ngayomi*, saya dan istri saya selalu memberikan keramahan yang terbaik untuk tamu yang datang ke warung, dengan menyapa mereka saat mereka datang, menanyakan dengan ramah apa yang menjadi pesanan mereka, dan melakukan obrolan-obrolan ringan untuk membuka pembicaraan dan menciptakan suasana hati yang lebih baik. Ketika mereka selesai dan membayar, kita selalu meluangkan waktu untuk bertanya tentang mereka. Jika mereka adalah orang baru, penulis akan menjawab apa yang ingin mereka ketahui dan merekomendasikan beberapa tempat wisata di Kaliurang. Dengan strategi ini, sebagian besar pelanggan penulis kembali lagi, dan mengatakan bahwa mereka menikmati cara saya dan istri mengelola warung. Penting untuk *eman-eman* (peduli) dengan pelanggan Anda' (G, pemilik Warung).

Strategi ini telah terbukti berhasil bagi pemilik penjual makanan di sekitar Tugu Udang yang dapat dengan cepat pulih setelah Kaliurang dibuka untuk wisatawan. Bahkan strategi ini membantu

mereka untuk bertahan hidup selama krisis. Strategi yang digunakan oleh penjual makanan di sekitar Tugu Udang ini bukanlah sesuatu yang baru, strategi ini juga digunakan oleh sopir dan pemilik jip di Kaliurang yang menawarkan atraksi lava tour. Meskipun menerapkan ide yang sama yaitu *ngayomi* pelanggan, implementasi ide ini di kalangan sopir dan pemilik jip berbeda, seperti mereka tidak mengingat kesenangan tamu mereka, tetapi mereka mencoba membuat kenangan terbaik dari perjalanan dengan membuat atraksi yang bersifat personal. Mereka juga menggunakan strategi pemberian diskon yang tepat untuk menarik tamu mereka, membawa tamu ke tempat yang indah untuk berfoto dan menawarkan kemampuan fotografi mereka yang mendukung pengalaman wisata tamu mereka melalui foto-foto yang bagus. Dengan melakukan bentuk hubungan diadik ini, hal ini membantu mereka sebagai aktor individu untuk bertahan dalam krisis ini.

Pada tahun 2021, para pelaku pariwisata lebih banyak menerapkan strategi individu untuk bertahan hidup. Beberapa pelaku lebih memilih untuk menggunakan tabungan mereka sendiri atau menjual apa yang mereka miliki karena mereka tidak memiliki pilihan untuk melakukan pekerjaan lain. Banyak pelaku, terutama laki-laki mulai melakukan dua pekerjaan atau lebih, sebagai pelaku pariwisata dan melakukan pekerjaan lain selain pariwisata. Karena mereka tidak bisa menunggu bantuan dari orang-orang di luar Kaliurang, mereka harus segera mengatasi situasi krisis ini. Di masa sulit ini, banyak pelaku pariwisata yang mencari pekerjaan lain, beberapa di antaranya memulai pekerjaan baru sebagai buruh harian di vila atau pembangunan rumah. Dari pekerjaan ini mereka mendapatkan penghasilan harian sekitar 80.000 rupiah/hari. Kebanyakan dari mereka memilih untuk bekerja lima hari dalam seminggu, dan bekerja di bidang pariwisata pada akhir pekan. Penghasilan dari menjadi buruh memang kecil jika dibandingkan dengan penghasilan mereka sebelumnya dari pariwisata, namun pekerjaan rasional inilah yang membantu para pelaku pariwisata dan keluarganya untuk bertahan hidup. Beberapa dari mereka lebih memilih untuk bekerja di koperasi UPP dan mulai terlibat lagi dengan produksi susu yang sangat populer di Kaliurang pada tahun 1970-1990an.

Karena informasi untuk pekerjaan semacam ini berasal dari lingkungan sekitar mereka, anggota masyarakat lain, atau kerabat/keluarga mereka. Hal ini sebagai bentuk solidaritas sosial yang menggunakan konsep tolong menolong 'keluarga' atau *nolong sedulur*. Istilah keluarga atau sedulur tidak selalu mengacu pada hubungan darah, tetapi sebagai ikatan integratif (Jay, 1969, p. 237). Istilah ini merujuk pada hubungan sosial yang ideal antar individu, terutama antara tetangga atau lingkaran dekat individu, dalam istilah (Geertz, 1973, p. 148), antara orang-orang yang memiliki kesamaan geografis dan ideologis. Ini berarti bahwa respon dari individu dan masyarakat tidak spontan, tetapi mencerminkan nilai kejawaan mereka untuk menciptakan harmoni dan hidup rukun (Hawkins, 1996). Hal ini menentukan cairnya hubungan dan koneksi yang muncul selama krisis pandemi covid-19 ini.

#### 4. Pembahasan: Solidaritas Sebagai Bentuk Perlindungan Sosial di Masa Krisis

Kemunculan pariwisata dan pengembangan ide pariwisata berdampak kuat pada erosi nilai sosial di kalangan masyarakat Kaliurang. Fokus masyarakat lokal telah bergeser dari ide harmoni menjadi sudut pandang yang lebih ekonomis untuk mendapatkan keuntungan material (Mulyasari & Rahmadian, 2023). Proses transformasi sosial budaya dan infrastruktur sebagai respon terhadap pariwisata membawa mereka ke dalam bentuk relasi sosial baru yang penuh dengan persaingan dan terkadang gesekan atau konflik. Meskipun masyarakat lokal yang dominan hidup dari pariwisata pernah menghadapi krisis akibat erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010, namun hal tersebut tidak membuat mereka sepenuhnya mengadopsi nilai harmoni Jawa. Hal ini menciptakan solidaritas masyarakat, namun penanganan dan adaptasi yang cepat dari para pelaku pariwisata hanya membuat mereka semakin bersaing dalam pariwisata.

Sayangnya, krisis yang disebabkan oleh pandemi covid-19 telah mengguncang struktur yang telah terbentuk. Dalam satu setengah tahun terakhir, masyarakat lokal di Kaliurang yang bergantung pada pariwisata mengalami kematian ekonomi. Di awal pandemi tahun 2020, pembatasan terkait covid-19 membuat mereka berhenti menjalankan aktivitas pariwisata. Mereka melakukan tindakan lock down lokal untuk merespon pandemi selama dua bulan, dan hanya mendapatkan sedikit dukungan dari pemerintah. Situasi global yang semakin memburuk membuat para pelaku pariwisata melakukan aksi

nyata sebagai bentuk solidaritas, seperti berbagi makanan dan uang di lingkungan sekitar dan masyarakat. Beberapa dari mereka mengumpulkan dana dari para donatur dan membagikannya kepada orang lain. Sebagian lainnya memberikan informasi tentang pekerjaan sampingan. Tindakan-tindakan ini telah menerapkan gagasan gotong royong dalam bentuk '*nolong sedulur*' yang menunjukkan bahwa krisis telah membawa kembali nilai moral Jawa yang rukun dan suka menolong (Kutanegara, 2017).

Selama satu setengah tahun, bentuk solidaritas di antara para pelaku pariwisata berubah dengan cepat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Banyak tindakan yang dikategorikan sebagai solidaritas sosial yang muncul selama krisis pandemi di Kaliurang mengandalkan sumber daya dan donor dari luar komunitas. Hal ini membuat tindakan tersebut cepat berubah dan tidak memiliki kesinambungan. Namun, di kalangan masyarakat lokal di Kaliurang (termasuk di antara para pelaku pariwisata) proses solidaritas sosial dalam bentuk hubungan tatap muka berjalan dengan saling berbagi informasi, memberi utang, atau berbagi makanan.

Dalam konteks kegiatan pariwisata, proses menjaga keharmonisan melalui perlindungan terhadap orang lain yang tersesat atau dalam kesulitan juga muncul antara pelaku pariwisata dengan wisatawan setianya dalam bentuk hubungan 'langganan'. Semua hubungan tatap muka yang digunakan untuk menjaga keharmonisan selama krisis, mungkin melibatkan 'pengorbanan tujuan dan aspirasi individu' (Peacock: 1968). Dalam hal ini, keberhasilan proses bertahan para pelaku pariwisata di Kaliurang memperkuat solidaritas di antara mereka sebagai perlindungan sosial. Krisis pandemi merekonstruksi struktur sosial budaya, termasuk implementasi struktur pariwisata yang membuat para pelaku pariwisata mengadopsi nilai penting harmoni dalam bisnis pariwisata mereka. Dalam hal ini, proses bertahan hidup selalu terkait dengan 'yang lain' sementara dalam kasus pelaku pariwisata di Kaliurang, mereka menggunakan kekuatan komunitas, serta kekuatan individu dari koneksi dan relasi yang mereka bangun di antara sesama pelaku pariwisata maupun dengan tamu dan orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini, gagasan rukun atau harmoni bukanlah sebuah praktik melainkan 'sebuah konsep ideologis utama yang melaluinya orang Jawa mengontekstualisasikan dan memahami kehidupan mereka, aspirasi mereka, motivasi mereka, dan hubungan sosial mereka' (Hawkins, 1996).

## 5. Kesimpulan

Krisis yang terjadi di Kaliurang tidak sepenuhnya disebabkan oleh Covid-19, tetapi juga oleh wacana krisis alam yang disebabkan oleh letusan Gunung Merapi. Krisis ini tidak hanya menghentikan persaingan antar pelaku pariwisata di Kaliurang, namun juga mengganggu struktur sosial ekonomi yang sudah ada. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat setempat memiliki ketergantungan yang kuat terhadap kegiatan pariwisata sebagai sumber utama kehidupan yang membuat mereka mengadopsi persaingan yang tinggi satu sama lain dan agak melupakan nilai moral untuk hidup rukun. Situasi pada masa krisis Covid-19 ini berbeda jika dibandingkan dengan krisis sumber daya alam yang disebabkan oleh erupsi Gunung Merapi. Pada masa krisis ini, para pelaku pariwisata harus menghentikan semua kegiatan pariwisata yang membuat mereka mati suri dalam bentuk pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah dengan penerapan pembatasan mobilitas. Sudah satu setengah tahun dan kondisinya relatif sulit.

Berbagai gerakan lokal dalam bentuk solidaritas komunitas dan individu muncul sebagai respon atas situasi pandemi, seperti *#merapi* berbagi makanan, lokal berbagi makanan, memberi uang dan pinjaman, gerakan komunitas berbagi sembako dan uang, berbagi informasi pekerjaan, dan langganan. Bentuk-bentuk praktik tersebut secara spontan dirancang untuk membuat semua pelaku pariwisata dapat bertahan di masa pandemi ini. Perlindungan sosial yang ditunjukkan dalam kasus pariwisata di Kaliurang bukan berasal dari pemerintah sebagai pusat kekuasaan dan sumber daya, tetapi berasal dari solidaritas sosial yang muncul sebagai respons atas kesenjangan peran pemerintah. Krisis Pandemi telah mengembalikan pentingnya nilai-nilai moral Jawa untuk berbagi dan peduli melalui gagasan kerukunan dan rukun.

## 6. Saran

Berdasar pada hasil penelitian ini, ada tiga saran yang muncul baik dalam tataran teoritis dan praktis. Secara teoritis perlu pemahaman baru tentang perlindungan sosial atau *social security* dalam kajian pariwisata. Penelitian berikutnya dapat membahas secara kritis mengenai konsep perlindungan sosial dalam sudut pandang pariwisata. Secara praktis, diketahui bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang rentan dan perlu adanya perlindungan bagi aktor pariwisata dalam bentuk asuransi maupun jaminan sosial lainnya. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu untuk segera menyiapkan skema asuransi maupun jaminan sosial bagi pekerja informal, termasuk di sektor pariwisata. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran dari para pelaku wisata dan komunitas wisata bahwa relasi sosial merupakan tombak keberlanjutan pariwisata yang perlu dijaga dan dapat menjadi bentuk perlindungan sosial jangka panjang.

**Ucapan terimakasih:** Penulis pertama dan kedua berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan naskah artikel di setiap bagian. Selain itu, penulis berterima kasih kepada Pujo Semedi, Fajar Sulistya, dan Ardana Kusumawanto telah diizinkan membaca data etnografi mereka di Kaliurang serta Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan pendanaan untuk penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- Bowen, J. R. (1986). On the political construction of tradition: Gotong Royong in Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 45(3), 545-561.
- Foley, M., & Lennon, J. J. (1996). JFK and dark tourism: A fascination with assassination. *International Journal of Heritage Studies*, 2(4), 198-211.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures* (Vol. 5019). Basic books.
- Geertz, H. (1961). The Javanese family: A study of kinship and socialization.
- Ghimire, H. L. (2015). Disaster management and post-quake impact on tourism in Nepal. *The Gaze: Journal of Tourism and Hospitality*, 7, 37-57.
- Habibullah(2017). Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia. *Sosio Informa*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.492>
- Hall, C. M. (2011). Biosecurity, tourism and mobility: institutional arrangements for managing tourism-related biological invasions. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 3(3), 256-280.
- Hawkins, M. (1996). Is rukun dead? Ethnographic interpretations of social change and Javanese culture. *The Australian journal of anthropology*, 7(1), 218-234. <https://doi.org/10.1111/j.1835-9310.1996.tb00329.x>
- Ingold, T. (2000). Evolving skills. *Alas, poor Darwin: Arguments against evolutionary psychology*, 273-297.
- Jay, R. R. (1969). Javanese villagers: Social relations in rural Modjokuto.
- Kaag, M., et. al. (2005). *Poverty is Bad: Ways Forward in Livelihood Research*. CERES.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kutanegara, P. M. (2017). *Poverty, Crises, and Social Solidarity in Sriharjo, Rural Java*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kutanegara, P. M., & Nootboom, G. (2000). Forgotten villages. The effects of the crisis and the role of the government in rural Java.
- Medina, L. (2002). Commoditizing Culture Tourism and Maya Identity. *Annals of Tourism Research*, 30(2), 353-368.
- McKibbin, W. J., & Fernando, R. (2020). 'The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios' in *CAMA Working Paper No. 19/2020*.
- Mulyasari, R. (2023). Menilik Ulang Resiliensi: Covid-19 dan Pariwisata di Kaliurang Yogyakarta. *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 7(1), 39-57.
- Mulyasari, R., & Rahmadian, G. (2023). Kerentanan Pariwisata dan responnya: Studi Kasus Covid 19 di Kawasan Wisata Kaliurang. *Gadjah Mada Journal of Tourism Studies*, 4(1), 25-41.
- Nootboom, G. (2003). *A Matter of Style: Social Security and Livelihood in Upland East Java*. PhD Thesis. Nijmegen: University of Nijmegen.
- Nugroho, Y., & Negara, S. D. (2020). 'COVID-19's Impact on Micro, Small, and Medium Enterprises and Tourism in Indonesia' in *ISEAS Perspective*, Issue: 2020 No. 124. ISSN 2335-6677
- Sahlins, M. (1974). *Stone Age Economics*. London: Tavistock.
- Scott, D., & Gosling, S. (2015). 'What could the next 40 years hold for global tourism?' In *Tourism Recreation Research*, 40(3), 269-285.

- Semedi, P. (2021). 'A Power Approach and the Coronavirus Pandemic in Yogyakarta' in *Humaniora*, Vol. 33, No. 1 (February 2021), pp. 1-16. <https://doi.org/10.22146/jh.62339>
- Susanto, J. A. X., & Sushartami, W. (2020). 'Wong Ndhuur, Wong Ngisor: Local Community and Post-disaster Tourism in Kinahrejo' in *Humaniora*, Vol. 32, No. 3 (October 2020) pp. 271-282. <https://doi.org/10.22146/jh.57693>.
- Susantyo, B., Habibullah, H., Irmayani, N. R., Erwinsyah, R. G., Nainggolan, T., Sugiyanto, S., Rahman, A., Arifin, J., As'adhanayadi, B., & Nurhayu, N. (2023). Social cash assistance for food security during a disaster: lesson learned from Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environment. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1180/1/012047>
- Wright, D. (2014). Residents' perceptions of dark tourism development: The case of L'Aquila, Italy. *Doctoral Dissertation*. University of Central Lancashire.
- \_\_\_\_\_. (2020). *Statistik Kepariwisataaan 2020*. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).